

---

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR DALAM UPAYA MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI INDONESIA

Oleh

Seif Malik Aziz

UIN "Sultan Maulana Hasanuddin Banten"

Email: [seifmalikaziz@gmail.com](mailto:seifmalikaziz@gmail.com)

---

### **Article History:**

Received: 21-05-2023

Revised: 29-05-2023

Accepted: 24-06-2023

### **Keywords:**

Freedom to Learn, Quality,  
Education

**Abstract:** *This research will discuss about what is meant by freedom to learn, what are the aims of the freedom to learn policy and what are the implications of the policy of freedom to learn in efforts to improve the quality of education in Indonesia. The research method used is a descriptive qualitative research method using literature study. Research data will be analyzed descriptively based on theories and new findings resulting from literature review.*

*The research results reveal that freedom to learn is the freedom for education (schools, teachers and students) to innovate, be independent and creative. The aim of independent learning is so that teachers, students and parents can have a happy atmosphere. Some of the implications of the independent learning policy in an effort to improve the quality of education include; Student-oriented learning, teacher commitment, curriculum management and learning processes.*

---

## PENDAHULUAN

Pada abad 21 ini kompetisi dalam dunia Pendidikan semakin tinggi, sehingga Lembaga Pendidikan dituntut untuk lebih cepat dan tepat dalam mengembangkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan siswa yang dibutuhkan sekolah dan masyarakat khususnya dunia semata,<sup>1</sup> namun juga harus sesuai dengan era revolusi Industri 4.0, era society 5.0. Hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab besar pemerintah pada sektor Pendidikan. Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan saat ini menjadi prioritas utama agar menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghadapi globalisasi.<sup>2</sup> Dalam cakupan Pendidikan secara nasional, maka pendidikan nasional Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan yang sangat berat khususnya dalam upaya menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang mampu menghadapi persaingan global, pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul turut mendukung kemajuan bangsa,

---

<sup>1</sup> Bamalli, H.S. (2013). Competencies and Strategies for the Teaching of 21st Century Learners in Vocational Home Economics Education. *Journal of Educational and Social Research*, 3 (9) : 105-108

<sup>2</sup> Baro'ah, S. (2020). Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Tawadhu*, 4(1), 1063-1073

terlebih dalam menghadapi era revolusi industri seperti sekarang ini, bangsa Indonesia harus menghadapi persaingan dengan kreativitas, inovasi, dan kecepatan.

Menurut Mulyasa dewasa ini upaya peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan oleh berbagai pihak dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia dan pengembangan watak bangsa.<sup>3</sup> Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan dibidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh. Mutu pendidikan merupakan faktor penting yang harus diwujudkan dalam proses pendidikan.

Salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan ialah membuat kebijakan baru terkait kurikulum. Kurikulum yang saat ini dicanangkan oleh pemerintah khususnya menteri pendidikan adalah kurikulum merdeka belajar. Konsep kurikulum merdeka belajar ini menekankan pada pemberian kebebasan di bidang Pendidikan.<sup>4</sup> Untuk itu, pembangunan di sektor pendidikan perlu dirancang agar berbagai tantangan dan permasalahan yang muncul dapat diatasi. Dunia pendidikan nasional perlu dirancang agar mampu melahirkan generasi yang memiliki keunggulan pada era globalisasi seperti sekarang ini. Untuk itu tulisan ini bertujuan untuk membahas lebih jauh tentang apa yang dimaksud merdeka belajar, apa tujuan kebijakan merdeka belajar dan bagaimana implikasi kebijakan merdeka belajar dalam upaya meningkatkan mutu Pendidikan di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam metode kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan dasar teori di manfaatkan sebagai pemandu juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif, yaitu suatu metode meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Jenis metode deskriptif yang dilakukan yaitu penelitian perpustakaan merupakan kegiatan mengamati berbagai literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dianggap baik itu berupa buku, makalah ataupun tulisan yang sifatnya membantu sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam proses penelitian. Penelitian perpustakaan berarti sumber data diambil dari berbagai sumber data yang relevan dengan topik yang diangkat yaitu merdeka belajar sebagai strategi peningkatan mutu Pendidikan.

---

<sup>3</sup> Mulyasa. Menjadi Guru Profesional (Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan). Bandung Rosda. Cetakan Ke-IX. 2010.

<sup>4</sup> Faiz, A., & Kurniawaty, I. (2020). Konsep Merdeka Belajar Pendidikan Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Progresivisme Konstruktivisme, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 12 (2): 155-164

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Merdeka Belajar

Merdeka belajar adalah kebebasan untuk Pendidikan (sekolah, guru dan murid) dalam berinovasi, mandiri dan kreatif. Terobosan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentang merdeka belajar dimaksudkan untuk memajukan mutu pendidikan di Indonesia. Tujuan merdeka belajar adalah agar para guru, peserta didik, serta orang tua bisa mendapat suasana yang bahagia. —Merdeka belajar itu bahwa proses pendidikan harus menciptakan suasana-suasana yang membahagiakan. Bahagia buat siapa? Bahagia buat guru, bahagia buat peserta didik, bahagia buat orang tua, dan bahagia untuk semua orang.<sup>5</sup> Merdeka Belajar merupakan proses pembelajaran secara alami untuk mencapai kemerdekaan. Diperlukan belajar merdeka terlebih dahulu karena bisa jadi masih ada hal-hal yang membelenggu rasa kemerdekaan, rasa belum merdeka dan ruang gerak yang sempit untuk merdeka. Esensi Merdeka Belajar adalah menggali potensi terbesar para guru dan siswa untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Mandiri bukan hanya mengikuti proses birokrasi pendidikan, tapi benar-benar inovasi Pendidikan.<sup>6</sup>

### B. Mutu Lembaga Pendidikan

Mutu berarti “Karat” baik buruknya sesuatu, kualitas, taraf/derajat (kepandaian, kecerdasan).<sup>7</sup> Mutu diartikan sebagai segala sesuatu yang menentukan kepuasan pelanggan dan upaya perubahan ke arah perbaikan terus menerus sehingga dikenal dengan Q = Match (Quality = Meets Agreed Terms and Changes).<sup>8</sup> Dalam mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup, *input, proses dan output* pendidikan.<sup>9</sup> Pengertian mutu lebih spesifik sebagaimana dijelaskan Nanang dalam tulisannya yang menyatakan bahwa mutu adalah kemampuan (*ability*) yang dimiliki suatu jasa yang dapat memenuhi kebutuhan, kepuasan (*satisfaction*), pelanggan (*customers*) dalam pendidikan. Customers dikelompokkan menjadi dua yaitu *internal customer* dan *eksternal customer*. *Internal customer* yaitu siswa dan *customer eksternal* yaitu masyarakat dan dunia industri.<sup>10</sup> mutu tidak bisa berdiri sendiri melainkan perlu adanya hal-hal atau faktor yang dapat membantu dalam pencapaian dan pemeliharannya. Dalam hal ini maka penjaminan mutu (*Quality Assurance System*) sangat dibutuhkan.

Sementara pendidikan adalah perbuatan mendidik jadi secara etimologi mutu pendidikan adalah kualitas perbuatan mendidik, perbuatan disini adalah interaksi antara

<sup>5</sup> Syukri Bayumie, AP.,SE.,M.Si. 2020. Menakar Konsep Merdeka Belajar(<https://intens.news/menakar-konsep-merdeka-belajar/>diakses Tanggal 30 Mei 2020 Pukul 10.30 wita

<sup>6</sup> Prayogo. 2020. Peluang Reformasi Pendidikan Di Tengah Pandemi Covid-19. <https://www.y.prayogo.kalderanews.com/2020/05/peluang-reformasi-pendidikan-di-tengah-pandemi-covid-19-begini-kata-mendikbud/>. Diakses tanggal 30 Mei 2020 Pukul 12. 43

<sup>7</sup> W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2012), 604

<sup>8</sup> Vincent Gasperz, *Total Quality Manajemen*, (Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 2003), 5

<sup>9</sup> Depdiknas, *Manajemen Penjaminan mutu berbasis Madrasah, Buku I Konsep dan Pelaksana*, (Jakarta : 2001), 24

<sup>10</sup> Nanang Fatah. *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*.(Bandung :Remaja Rosdakarya.2013), 2

guru dan murid dalam proses belajar mengajar dikelas.<sup>11</sup> Dalam Undang-Undang Sistem pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) Tahun 2003 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Dalam pengertian yang sederhana makna pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan.<sup>12</sup>

Dengan demikian pendidikan merupakan suatu bimbingan, pengarahan, dan tuntunan yang dilakukan oleh pendidik untuk menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi peserta didik secara maksimal dan integral, baik aspek jasmani, rohani, aspek sensual logis (ranah kognisi), sensual empiris (ranah psikomotorik), maupun aspek moral-transendental (ranah afektif), baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan kompetensi, baik kompetensi akademik ataupun kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial, serta nilai-nilai akhlak mulia yang keseluruhan merupakan kecakapan hidup (*Life Skill*) selain itu menghasilkan manusia yang seutuhnya (manusia paripurna) atau manusia yang pribadi integral (*integrated personality*) yaitu mereka yang mampu mengintegrasikan iman, ilmu dan amal.<sup>13</sup> Adapun pengertian lembaga pendidikan Islam adalah tempat atau organisasi yang menyelenggarakan pendidikan Islam, yang mempunyai struktur yang jelas dan bertanggung jawab atas terlaksananya pendidikan Islam.<sup>14</sup> Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam tersebut harus dapat menciptakan suasana yang memungkinkan terlaksananya pendidikan dengan baik, menurut tugas yang diberikan kepadanya, seperti sekolah (madrasah) yang melaksanakan proses pendidikan Islam agar mutu pendidikan Islam terus lebih baik. Maka menurut penulis mutu pendidikan adalah kualitas penyelenggaraan pendidikan yang meliputi: kesiapan siswa, ketersediaan tenaga pengajar, sarana dan prasarana, metode pembelajaran, relevansi pendidikan dengan kebutuhan, susana lingkungan dan iklim sekolah. Mutu pendidikan yang dimaksud disini adalah kemampuan lembaga pendidikan islam dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin.

---

<sup>11</sup> W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2012), h. 604

<sup>12</sup> Abd Rahman, Sabhayati Asri Munandar, Andi Fitriani, Yuyun Karlina, Yumriani. Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan. Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam. Volume 2, Nomor 1, Juni 2022. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/alurwatul>. 1-8

<sup>13</sup> Hari Sudrajat, *Manajemen Peningkatan mutu berbasis sekolah; Peningkatan mutu Pendidikan melalui Implementasi KBK* (Bandung: Cipta Lekas Grafika, 2005), h.112

<sup>14</sup> Ibrahim Bafadhol, Lembaga Pendidikan Islam Di Indoesia. Jurnal Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam Vol. 06 No.11, Januari 2017. 59-71

Mutu Pendidikan sangatlah ditentukan oleh manajemen kurikulum, SDM, maupun proses pembelajaran. Ketiga unsur ini akan ditentukan oleh berbagai kebijakan yang dikeluarkan Kepala Madrasah yang harus mengacu pada kebutuhan dan kemampuan madrasah dalam hal meningkatkan mutu. Kebijakan kebijakan juga harus memperhatikan semua unsur kebutuhan madrasah mulai dari siswa, guru dan wali murid. Hal ini sesuai yang ungkapkan Mulyasa yang menyatakan bahwa Pendidikan yang bermutu bukan hanya dilihat dari kualitas lulusannya tetapi juga mencakup bagaimana lembaga pendidikan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Pelanggan dalam hal ini adalah pelanggan internal (peserta didik, orang tua, masyarakat dan pemakai lulusan).<sup>15</sup> Peningkatan mutu madrasah juga harus dilakukan secara konsisten, terencana dan memiliki target yang jelas yang akan dicapai. Pencapaian mutu secara total dan berkesinambungan serta melibatkan semua unsur secara terpadu ini dikenal dengan istilah *total quality manajement* (TQM).

Total Quality Manajement merupakan budaya peningkatan mutu pendidikan secara terus menerus, fokus pada *stakeholder* sekolah demi kepuasan jangka panjangnya dan partisipasi warga sekolah, keluarga, masyarakat dan pemerintah.<sup>16</sup> Maka untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan harus ada beberapa unsur dalam penerapannya dalam lembaga pendidikan Islam seperti Madrasah, unsur-unsur yang dimaksud adalah:

1. Pendidikan harus merupakan usaha sadar yang harus dilakukan oleh orang tua atau orang dewasa atau siapa saja yang bertanggung jawab dalam rangka membimbing dan mempersiapkan anak dengan atas nama Allah SWT serta bertanggung jawab kepadanya
2. Bahwa yang dibimbing merupakan generasi muda dengan seluruh kelengkapan dasar dan potensi-potensi fitrahnya agar tumbuh kembang secara bertahap, yaitu kekhalifahan dengan penuh tanggung jawab kepada Allah SWT
3. Berpedoman kepada Al Qur'an, sehingga secara konseptual dan praktis, maka metode, pelaksanaan, materi, evaluasi dan alat-alatnya dapat dijabarkan dan dikembangkan dari Al Qur'an.<sup>17</sup>

Untuk menentukan dan menjamin mutu pendidikan secara nasional, maka pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, mengkalirifikasi 8 standart mutu yang selanjutnya akan dilakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program satuan pendidikan. Ke delapan standar standar nasional itu adalah:

1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Kompetensi merupakan seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.

<sup>15</sup> Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam konteks Mensukseskan MBS dan KBK*, (Bandung : (PT. Remaja Rosdakarya, 2003), h.226

<sup>16</sup> Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik dan Teori Pendidikan* (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), h. 459

<sup>17</sup> Zulkarnain, *Transformasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 32

2. Standar Isi, Standar isi yaitu kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
3. Standar Proses, Standar proses yaitu kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan
4. Standar Pendidik dan Tenaga kependidikan, Standar Pendidik dan Kependidikan yaitu kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
5. Standar Sarana dan Prasarana, Standar sarana dan prasarana yaitu kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
6. Standar Pembiayaan Pendidikan, Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan dalam satu tahun.
7. Standar Pengelolaan, Standar Pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/ kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
8. Standar Penilaian, Standar Penilaian adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik.<sup>18</sup>

Delapan standar nasional pada akhirnya akan bermuara pada suatu tujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Kedelapan unsur ini diterapkan dalam lembaga pendidikan baik disekolah umum maupun di Madarasah.

### C. Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan.

Kebijakan merdeka belajar sebagaimana dicanangkan pemerintah mempunyai 4 kebijakan merdeka belajar yakni; penyelenggaraan Ujian Berbasis Nasional (USBN) diganti ujian (assesmen) yang diselenggarakan oleh sekolah masing-masing, penggantian UN (Ujia Nasional) sebagai indikator kelulusan dan keberhasilan peserta didik menjadi asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, guru diberi kebebasan dalam mengembangkan format RPP (Rencan Pelaksanaan Pembelajaran) dan perarutan tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang sebelumnya zonasi menjadi lebih fleksibel utuk mengakomodasi berbagai kondisi di daerah. Hal ini juga disampaikan Unifah<sup>19</sup> dalam pemaparan seminar Nasional bertajuk Merdeka Belajar; Aplikasinya dalam Manajemen Pendidikan & Pembelajaran di Sekolah, menyampaikan 4 Kebijakan Pendidikan Nasional "MERDEKA BELAJAR"

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Standar Nasional Pendidikan. (Jakarta: Sinar Grafik,2013 ). 2

<sup>19</sup> Unifah Rosyidi, Ketua PGRI, Merdeka Belajar; Aplikasinya dalam Manajemen Pendidikan &Pembelajaran di Sekolah ( makalah Seminar Nasional) Pasca Sarjana UNJ Jakarta, 10 Maret 2020. <https://pps.unj.ac.id/wp-content/uploads/2020/03/Merdeka-Belajar-UNJ-proses.pdf>

NO	KEBIJAKAN	DESKRIPSI
1	USBN menjadi asesmen oleh sekolah	menilai kompetensi siswa, melalui tes tertulis dan bentuk penilaian lain yang komprehensif. Guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Anggaran USBN dialihkan untuk pengembangan kapasitas guru dan sekolah.
2	UN diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum & Survei Karakter	tidak mengukur penguasaan materi mapel dlm kurikulum seperti yang diukur melalui UN selama ini. UN ke depan dilakukan untuk pemetaan kompetensi minimum literasi & numerasi siswa, dan memperkuat aplikasi pembelajaran yang diukur oleh PISA dan TIMSS. Dilakukan di tengah jenjang sekolah (kelas 4, 8, 11).
3	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	Guru bebas memilih, membuat, mengembangkan, dan menggunakan format RPP atas prakarsa dan inovasi sendiri. RPP dipersingkat yang berisi tujuan, kegiatan dan asesmen pembelajaran. Penulisan RPP efisien dan efektif agar guru punya waktu untuk menyiapkan dan evaluasi proses pembelajaran secara terarah
4	Sistem Zonasi PPDB dilaksanakan secara fleksibel	mengatasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Ada patokan standar PPDB antar-daerah, yaitu: jalur zonasi menerima siswa minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, jalur perpindahan maksimal 5%, dan jalur prestasi atau sisa 0-30%, sesuai dengan kondisi daerah. "Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi.

Beberapa implikasi dari kebijakan merdeka belajar sebagaimana dalam tabel di atas dalam upaya meningkatkan mutu Pendidikan madrasah diantaranya:

1. Pembelajaran yang berorientasi pada siswa

Pembelajaran harus menghasilkan belajar pada peserta didik dan harus dilakukan suatu perencanaan yang sistematis, sedangkan mengajar hanya salah satu penerapan strategi pembelajaran diantara strategi-strategi pembelajaran yang lain dengan tujuan

utamanya menyampaikan informasi kepada peserta didik.<sup>20</sup> Kalau diperhatikan, perbedaan kedua istilah ini bukanlah hal yang sepele, tetapi telah menggeser paradigma pendidikan, pendidikan yang semula lebih berorientasi pada “mengajar” (guru yang lebih banyak berperan) telah berpindah kepada konsep “pembelajaran” (merencanakan kegiatan-kegiatan yang orientasinya kepada siswa agar terjadi belajar dalam dirinya). Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh pihak peserta didik atau murid. Pembelajaran sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas peserta didik yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pembelajaran.

## 2. Komitmen Guru

Komitmen guru adalah keterikatan emosional seorang guru dengan sekolah dimana ia bekerja sehingga ia bersedia bertahan, mengidentifikasi diri dan terlibat untuk mencapai tujuan sekolah. Terdapat beberapa jenis komitmen yang terkait dengan guru yaitu: komitmen profesi, komitmen pada anak didik dan komitmen pada masyarakat.<sup>21</sup> Guru yang berkomitmen mengembangkan pengetahuan, sikap yang diinginkan dan keterampilan yang dibutuhkan.<sup>22</sup> Sebagian guru di Indonesia melihat komitmen mereka sebagai bagian dari identitas profesional mereka sehingga mereka mendapatkan banyak kenikmatan dari komitmen tersebut, namun tidak sedikit guru menganggap bahwa komitmen sebagai guru membutuhkan investasi pribadi yang besar dan melihatnya sebagai pekerjaan yang berat sehingga merasakan berat dalam menjalani komitmen tersebut.

## 3. Manajemen Kurikulum

Kurikulum adalah rencana program pengajaran atau Pendidikan yang akan diberikan kepada anak didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang akan diberikan kepada anak didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ibaratkan orang yang akan membangun rumah, kurikulum adalah blue print (gambar cetak birunya). Kurikulum atau program pendidikan inilah sebenarnya ditawarkan atau dijual oleh suatu lembaga pendidikan kepada masyarakat. Menurut Azhari<sup>23</sup> ruang lingkup manajemen kurikulum terdiri dari beberapa bagian, yaitu: (a) manajemen perencanaan dan pengembangan kurikulum; (b) manajemen pelaksanaan kurikulum; (c) supervisi pelaksanaan kurikulum; (d) pemantauan dan penilaian kurikulum; (e) perbaikan kurikulum; (f) desentralisasi dan sentralisasi pengembangan kurikulum; (g) masalah. aktivitas manajemen kurikulum inimerupakan kolaborasi antara kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah beserta peran guru dalam melakukan kegiatan

<sup>20</sup> Evelin Siregar & Hartini Nara. Teori Belajar dan Pembelajaran. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.

<sup>21</sup> Hussen, A. A., & Teshome, T. Z. (2016). Teachers Professional Commitment Towards Students Learning , Their Profession and The Community In Eastern Ethiopian Secondary Schools. Journal Of Teacher Education And Educators, 5(3), 289–314

<sup>22</sup> Jane, J. S. A. M., & Kumar, S. P. (2017). Teacher Commitment and Student Achievement In Chemistry At Higher Secondary Level. International Journal of Current Research and Modern Education (IJCRME), 2(1), 37–40

<sup>23</sup> Azhari, Muhammad. (2017). Manajemen Kurikulum dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. Jurnal Analytica Islamica. Vol. 6 No. 2.

manajerial agar perencanaan berlangsung dengan baik. Dari definisi manajemen kurikulum di atas, dapat dipahami bahwa manajemen kurikulum merupakan sebuah proses kerjasama dalam mengelola kurikulum untuk mencapai tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan secara efisien dan efektif ketenagaan dalam pengembangan kurikulum serta model-model kepemimpinan yang serasi pada konteks masyarakat yang berkembang dinamis dewasa ini.

#### D. Faktor Pendukung dan Penghambat Tercapainya Mutu Pendidikan

Faktor pendukung tercapainya mutu pendidikan dalam sebuah madrasah akan sangat ditentukan beberapa faktor, diantaranya tujuan yang akan dicapai, konsistensi pemegang kebijakan, kerjasama semua pihak, manajemen madrasah dan lain sebagainya. Hal inipulalah yang duungkapkan Nanang Fatah yang menyatakan bahwa grand desain mutu pendidikan akan ditentukan oleh: Kepemimpinan yang visioner (*Visionary Leadership*), Pembelajaran berfokus pada pendidikan (*Learning Centered Education*), Pembelajaran perorangan dan organisasi (*Organizational and Personal Learning*), Menghargai tenaga pendidik, staf dan mitra kerja (*Valuing Faculty, staff dan Partners*), Kegesitan (*Agility*), Fokus pada masa depan, Mengelola inovasi, Manajemen berdasarkan fakta, Pertanggungjawaban sosial dan Persepektif keislaman.<sup>24</sup>

Selain adanya pendukung dalam meningkatkan mutu, maka juga terdapat beberapa faktor yang akan menjadi hambatan tercapainya mutu pendidikan madrasah, sebagaimana diungkapkan Maslikhah yang mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan mutu lembaga pendidikan tidak tercapai, yaitu:

1. Fungsi dan tujuan pendidikan yang kurang melekat pada pelaksana dan pelaksanaan pendidikan
2. Prinsip penyelenggaraan pendidikan yang demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif tidak dijadikan prinsip yang menjunjung tinggi
3. Masyarakat seringkali diberlakukan sebagai komunitas untuk melegalkan sebuah kebijakan pelaksana pendidikan, dan bukan sebagai pelaku untuk memberdayakan madrasahnyanya
4. Evaluasi pendidikan sering dibelokan dengan kepentingan tertentu.<sup>25</sup>

Dari semua pembahasan dari berbagai aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan merdeka belajar hakikatnya memberikan solusi dalam meningkatkan mutu Pendidikan di Indonesia, baik dari aspek pembelajaran, guru maupun kurikulum. Keberadaan merdeka belajar memberikan terobosan baru dalam melakukan inovasi pembelajaran yang lebih bermutu serta adaptif terhadap perubahan menjadikan Lembaga Pendidikan di Indonesia lebih maju dan bermutu.

#### KESIMPULAN

Merdeka belajar adalah kebebasan untuk Pendidikan (sekolah, guru dan murid) dalam berinovasi, mandiri dan kreatif. Tujuan merdeka belajar adalah agar para guru, peserta didik, serta orang tua bisa mendapat suasana yang Bahagia. Kebijakan merdeka

<sup>24</sup> Nanang Fatah. *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan..* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2013). 4.

<sup>25</sup> Maslikhah, *Pendidikan Multikultural, Rekontruksi Pendidikan berbasis kebangsaan*, (Salatiga: STAIN Salatiga, 2007) h. 889

belajar sebagaimana dicanangkan pemerintah mempunyai 4 kebijakan merdeka belajar yakni; penyelenggaraan Ujian Berbasis Nasional (USBN) diganti ujian (asesmen) yang diselenggarakan oleh sekolah masing-masing, penggantian UN (Ujian Nasional) sebagai indikator kelulusan dan keberhasilan peserta didik menjadi asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, guru diberi kebebasan dalam mengembangkan format RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dan perarutan tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang sebelumnya zonasi menjadi lebih fleksibel untuk mengakomodasi berbagai kondisi di daerah. Kebijakan merdeka belajar hakikatnya memberikan solusi dalam meningkatkan mutu Pendidikan di Indonesia, baik dari aspek pembelajaran, guru maupun kurikulum. Beberapa implikasi dari kebijakan merdeka belajar dalam upaya meningkatkan mutu Pendidikan diantaranya; Pembelajaran yang berorientasi pada siswa, komitmen guru, manajemen kurikulum dan proses pembelajaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- [1] Depdiknas, Manajemen Penjaminan mutu berbasis Madrasah, Buku I Konsep dan Pelaksana, Jakarta : 2001.
- [2] Evelin Siregar & Hartini Nara. Teori Belajar dan Pembelajaran. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- [3] Hari Sudrajat, Manajemen Peningkatan mutu berbasis sekolah; Peningkatan mutu Pendidikan melalui Implementasi KBK Bandung: Cipta Lekas Grafika, 2005.
- [4] Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik dan Teori Pendidikan Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- [5] Kumar, R. (2011). Research Methodology A Step-By-Step Guide For Beginners (3rd Edition). California: Learning, Their Profession and The Community In Eastern Ethiopian Secondary
- [6] Maslikhah, Pendidikan Multikultural, Rekonstruksi Pendidikan berbasis kebangsaan, Salatiga: STAIN Salatiga, 2007.
- [7] Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam konteks Mensukseskan MBS dan KBK, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003.
- [8] Mulyasa. Menjadi Guru Profesional (Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan).
- [9] Nanang Fatah. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.2013.
- [10] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Sinar Grafik,2013.
- [11] Undang-Undang SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003
- [12] Vincent Gasperz, Total Quality Manajemen, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- [13] W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- [14] Zulkarnain, Transformasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

### Jurnal:

- [15] Abd Rahman, Sabhayati Asri Munandar, Andi Fitriani, Yuyun Karlina, Yumriani. Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan. Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam. Volume 2, Nomor 1, Juni 2022. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/alurwatul>. 1-8 Analytica Islamica. Vol. 6 No.

---

2. 1-8.

- [16] Azhari, Muhammad. (2017). Manajemen Kurikulum dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Analytica Islamica*. Vol. 6 No. 2.
- [17] Bamalli, H.S. (2013). Competencies and Strategies for the Teaching of 21st Century Learners in Vocational Home Economics Education. *Journal of Educational and Social Research*, 3 (9) : 105-108
- [18] Baro'ah, S. (2020). Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Tawadhu*, 4(1), 1063-1073
- [19] Faiz, A., & Kurniawaty, I. (2020). Konsep Merdeka Belajar Pendidikan Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Progresivisme Konstruktivisme, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 12 (2): 155-164
- [20] Hussen, A. A., & Teshome, T. Z. (2016). Teachers Professional Commitment Towards Students Learning, Their Profession and The Community In Eastern Ethiopian Secondary Schools. *Journal Of Teacher Education And Educators*, 5(3), 289–314
- [21] Ibrahim Bafadhol, Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia. *Jurnal Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 06 No.11, Januari 2017. 59-71
- [22] Jane, J. S. A. M., & Kumar, S. P. (2017). Teacher Commitment and Student Achievement In Chemistry At Higher Secondary Level. *International Journal of Current Research and Modern Education (IJCRME)*, 2(1), 37–40.
- [23] Prayogo. 2020. Peluang Reformasi Pendidikan Di Tengah Pandemi Covid-19. <https://www.y.prayogo.kalderanews.com/2020/05/peluang-reformasi-pendidikan-di-tengah-pandemi-covid-19-begini-kata-mendikbud/>.
- [24] Unifah Rosyidi, Ketua PGRI, Merdeka Belajar; Aplikasinya dalam Manajemen Pendidikan & Pembelajaran di Sekolah ( makalah Seminar Nasional) Pasca Sarjana UNJ Jakarta, 10 Maret 2020. <https://pps.unj.ac.id/wp-content/uploads/2020/03/Merdeka-Belajar-UNJ-proses.pdf>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN